

**ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN BANTUAN  
SOSIAL TUNAI (BST) DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Politik

**Oleh:**

**Kurniawan**

**NIM: 1657020057**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
TAHUN 2021**



## NOTA PEMBIMBING

Hal :Pengajuan Sidang Munaqosah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dan kami periksa serta diadakannya perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul judul **“Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang”** yang ditulis oleh saudara Kurniawan (1657020057) telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Walaikumussalam Wr.Wb

Palembang, Juli 2021

**Pembimbing I**



**Ainur Ropik, M.Si**  
NIP. 197906192007101005

**Pembimbing II**




**Reni Apriani, M. Si**  
NIDN. 2021049401

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kurniawan  
Nim : 1657020057  
Fajultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik/ Ilmu Politik  
JudulSkripsi : Analisis Ekonomi Politik Bantuan Sosial Tunai (BST)  
Di Kota Palembang

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang secara *online* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada :  
Hari/Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021  
Pukul : 13:00-14:00 WIB  
Tempat : Dirumah Via Online (*daring*) Melalui Aplikasi Zoom

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Strata Satu pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, Agustus 2021  
  
Prof Dr. Izomidin, MA  
NIP. 196206201988031001

### TIM PENGUJI

Ketua Sidang



Dr. Efi Yusnita, M.HI  
NIP. 197409242007012016

Sekretaris Sidang



Rylia Chandra Eka Viana, MA  
NIP. 198604520190301011

PENGUJI I



Dr. Taufik Akhyar, M.Si  
NIP. 197109132000031003

PENGUJI II



Afif Musthofa Kawwami, M.Sos  
NIDN. 2027029302

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniawan

Nim : 1657020057

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data dan informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh pengajuan skripsi ini.

Palembang, 10 Juli 2021



Kurniawan



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

”Diatas langit masih ada langit dan hiduplah seperti Padi”

### **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu berusaha dan berdoa untuk kesuksesanku, ketika dunia menutup pintunya pada saya Abah dan Emak membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku Bapak H.Ahim Ad dan Ibu Hj. Nawati.
2. Wakil Rektor II Uin Raden Fatah Bapak Dr. Abdul Hadi MA terimakasih seniorku telah memberikan nasihat serta motivasi selama perkuliahan.
3. Teman Hidup (Ririn Tania) terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, menemani disaat penelitian dan selalu memberikan motivasi , dan selalu ada dalam suka maupun duka dan sudah berjuang bersama ku selama ini.
4. Saudaraku Agusnadi, Novriansyah, Tryas Saputra, Muhammad Adry yang telah memberikan motivasi dan berdoa untuk kesuksesan diriku
5. Pembimbingku Bapak Ainur Ropik, M.Si dan Ibu Reni Apriani, M.Si yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendukung selesainya skripsi ini.
6. Dosen pembimbing akademik, Bapak Badarudin Azarkasyi, M.M.
7. Sahabat kecilku (Deni Kurniawan, Imas Mayda Putri, Dinda, Raka)
8. Sahabat seperjuangan skripsi (Hary Febriansyah, Imroatul Azizah, Shandika Putra, Taufiqurrahman, Ahmad Fauzan, May, Andara, Irvan, Evi Novita Sari, Yayas, Syarief Hidayat, Subhan Robihan, Aini Lutfiyyah, dan Teman Kelasku Ilmu Politik B)
9. Sahabat Pergerakanku PMII Palembang (Kak Ilham Ali Akbar, Kak Hengki, Kak Ucup, Kak Iqbal, Ganta, Budi, Fahri, serta Silva Marcelina, Kak Razik, Kak Kendi, Shela Perila, Akhzan, Lista Selviana, Moeby Suprandini, Ayu Lestari, Danti, Desvita, Sunnia), dan Kak Ratu Dewa selaku sekretaris daerah Kota Palembang serta senior-senior PMII di Lingkungan Uin Raden Fatah dan Pemerintahan Kota Palembang yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang. Penelitian ini membahas tentang Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi di kota Palembang dalam meningkatkan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dimana pembagian dan penyaluran bantuan sosial tunai yang dilakukan Pemerintah Pusat ditetapkan melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Palembang. Peneliti tertarik mengangkat permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu Bagaimana Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang dan Bagaimana Efektifitas Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Palembang. Objek penelitian ini yaitu Dinas Sosial, Kantor Pos dan masyarakat penerima BST di Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan publik oleh Arifin dan Rachbini (2001). Di dalam perekonomian, diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan tersebut diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Adapun berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai institusi ekonomi dan politik yang ada. Dari uraian tersebut, jelas ada hubungan antara ekonomi politik kelembagaan dengan kebijakan publik. Kelembagaan jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik. Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis dan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara yang berjenis lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yang terlibat langsung dalam pembagian dan penyaluran BST di Kota Palembang, data yang dikumpulkan adalah melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini belum berjalan dengan efektif, karena pendataan yang masih lama di program bantuan sosial sebelumnya pada Tahun 2015 sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diluncurkan pada Tahun 2020. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali karena masih terdapat pendataan calon penerima yang belum maksimal pada saat validasi dan verifikasi data penerima.

***Kata Kunci :Ekonomi Politik, Kebijakan, Bantuan Sosial Tunai (BST).***



## ABSTRACT

*This research is entitled “Analysis of Political Economy of Cash Social Assistance (BST) Policy in Palembang City. This study discusses Cash Social Assistance during the pandemic in the city of Palembang in improving the economy for the poor and vulnerable to the poor. Where the distribution and distribution of cash social assistance by the Central Government is determined through the Ministry of Social Affairs and the Regional Government through the Palembang City Social Service. Researchers are interested in raising issues that will be studied in this study, namely How the Political Economy of Cash Social Assistance (BST) Policy in Palembang City and How Effectiveness of Political Economy of Cash Social Assistance (BST) Policy in Palembang City This research was conducted in the city of Palembang. The object of this research is the Social Service, Post Office and BST recipient communities in Palembang City. The theory used is the theory of institutional political economy and public policy by Arifin and Rachbini (2001). In the economy, government intervention is needed. Such intervention is necessary if the market mechanism does not work perfectly. The various decisions concerning public policies are carried out by the government in accordance with existing economic and political institutions. From this description, it is clear that there is a relationship between institutional political economy and public policy. Institutions are clearly closely related to public policy, starting from the process of designing, formulating, organizational systems, and implementing public policies. The type of research used is analysis and qualitative approach with field type interview method. Sources of data in this study are related parties who are directly involved in the distribution and distribution of BST in Palembang City, the data collected is through interviews and documentation. The results of the study stated that in the management of Cash Social Assistance (BST) this has not been running effectively, because the data collection was still long in the previous social assistance program in 2015 while the Cash Social Assistance (BST) was launched in 2020. So it needs to be re-evaluated because there is still a data collection of prospective recipients that has not been maximized at the time of validation and verification of recipient data.*

**Keywords: Political Economy, Policy, Cash Social Assistance (BST).**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta ridho-Nya, sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat kemudahan disetiap kesulitan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dengan judul **“Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang”** Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan selaku dosen pembimbing I.
5. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Rylvian Chandra Ekaviana, MA. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Ibu Reni Apriani, M.Si sebagai Dosen pembimbing II skripsi saya.
9. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
11. Dinas Sosial Kota Palembang, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Kantor Pos Palembang serta masyarakat yang menjadi narasumber.

Bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Palembang, Juli 2021

Kurniaw

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKIRPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	14

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

A. Konsep Ekonomi Politik Kelembagaan dan Kebijakan Publik .....	17
B. Ekonomi Terhadap Kebijakan.....	22
C. Bantuan Sosial Tunai (BST) .....	23

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Palembang .....	29
B. Dinas Sosial.....	37

C. Visi dan Misi.....	39
-----------------------	----

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Pada Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang .....	43
1. Redistribusi Keuntungan Ekonomi Pada Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang.....	52
2. Relokasi Kesempatan Ekonomi Pada Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang.....	54
B. Efektifitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang Keseimbangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Terkena Dampak Pandemi Covid19.....	59

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang .....	3
Tabel 3.1 Luas Setiap Kecamatan di Kota Palembang .....	31
Tabel 3.2 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarg di Kota Palembang.....	33
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Jenis Kelamin .....	35
Tabel 3.4 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di kota Palembang .....	36
Tabel 3.5 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Dalam Partai Politik .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Palembang.....	30
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bentuk program penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada masyarakat yang miskin. Program Bantuan Sosial Tunai masuk dalam kategori Program Perlindungan Sosial. (Wynandin Imawan, 2008)

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dikeluarkan demi membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi . BST adalah program bantuan pemerintah berupa uang tunai , baik bersyarat maupun tidak untuk ,masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. (Fika Nurahmawati dan Sri Hartini, 2020).

Yang melatar belakangi program Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak lain dan tidak bukan hanyalah kemiskinan, faktor penyebab dari dampak yang ditimbulkan, terutama dalam sektor ekonomi itu sendiri. Karena kesulitan ekonomi dimasa Pandemi ini dapat menyebabkan masyarakat mengalami penurunan mekanisme pasar sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Berkurangnya daya jual dan daya beli masyarakat menyebabkan laju perekonomian menurun. Perekonomian yang sehat memerlukan landasan hukum yang sehat pula. Peran landasan hukum dari suatu perekonomian adalah memberikan struktur terprediksi dimana aktifitas pertukaran terjadi, berlangsung, dan berkembang. Persyaratan landasan hukum ini diperlukan, tidak peduli apakah perekonomian diorganisir dengan pola dimana pemerintah memegang peran kunci atau swasta yang menjadi aktor utama. Ketika pasar gagal menjalankan fungsinya, diperlukan campur tangan pemerintah. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya pemerintah juga



bisa dihadapkan pada kegagalan (kegagalan pemerintah, yang sifatnya kegagalan non pasar). (Drs. Deliarnov, M. Sc, 2006 :117). Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan atau Program BST kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam segi ekonomi guna meringankan beban masyarakat dimasa pandemi. Bantuan ini dimulai pada bulan April 2020 sampai April 2021.(Sumeks.com, 2020)

Hubungan dengan elit Politik Bantuan Sosial (Bansos) lebih condong pada satu aspek yakni, dimanfaatkan untuk kepentingan politik. lebih untuk mencari popularitas dan momen dimana mengambil kesempatan dalam program bantuan sosial tunai, Secara umum bantuan sosial berfungsi untuk sosial dan ekonomi. fungsi sosial ekonomi bertujuan menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan yang menimpa dikala pandemi seperti sekarang ini.

Beberapa program yang sejak dulu ditujukan untuk 10 juta penduduk berpenghasilan rendah saja masih bermasalah, apalagi data yang dirujuk untuk program bantuan sosial tuna (BST) masyarakat terdampak. Meski begitu, Kemensos tidak sepenuhnya disalahkan. Hal ini mengingat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kota Palembang.

Berdasarkan data yang diakses peneliti di halaman link sumeks.com penerima BST sejumlah 893.778 peserta aktif terhitung sejak 30 Juni 2020 yang telah mengajukan data tambahan yakni nomor rekening ke BP Jamsostek. Karena, nantinya seluruh penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 300 ribu yang dibayarkan setiap bulan. Total selama empat bulan akan langsung ditransferkan ke nomor rekening yang berhak.

Dari data yang diambil oleh peneliti pada saat pra penelitian di Dinas Sosial Kota Palembang dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Penerima Bantuan Sosial Tunai Di Kota Palembang**

<b>NO.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>JUMLAH PENERIMA</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>
1	Alang-Alang Lebar	181	72.387
2	Bukit Kecil	67	64.994
3	Gandus	65	93.013
4	Iilir Barat 1	117	90.978
5	Iilir Barat 2	116	92.172
6	Iilir Timur 1	131	105.815
7	Iilir Timur 2	506	89.643
8	Iilir Timur 3	30	139.933
9	Kalidoni	342	49.657
10	Kemuning	102	78.314

11	Kertapati	373	92.846
12	Plaju	479	94.810
13	Sako	350	111.691
14	Seberang Ulu 1	295	84.938
15	Seberang Ulu 2	161	92.301
16	Sematang Borang	244	36.033
17	Sukarami	177	156.509
18	Jakabaring	100	97.455
<b>JUMLAH</b>		<b>3835</b>	<b>1.643.488</b>

**Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.**

Berdasarkan tabel diatas jumlah penerima BST terbanyak ada di Kecamatan Iilir Timur II dengan jumlah 506 KK (Kartu Keluarga) dan jumlah penerima paling sedikit ada di Kecamatan Iilir Timur III dengan jumlah 30 KK (Kartu Keluarga) di Kota Palembang. Dari segi penyaluran, ternyata di Kota Palembang Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dinilai tidak tepat sasaran, dimana banyak masyarakat yang dikategorikan miskin tidak mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos). Ini diketahui karena kebanyakan orang-orang yang memiliki kendaraan roda empat yang menerima pencairan dana, bukan masyarakat yang tergolong miskin. (Intens.news, 2020)

Laporan demi laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) terkait bantuan sosial tunai ini meliputi pengaduan masyarakat secara daring, dimana kebanyakan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai bansos, serta kurangnya sosialisasi secara langsung mengenai bantuan sosial tunai karena minimnya masyarakat miskin di beberapa kelurahan yang kurang paham sosial media dan internet. (Pelita Sumsel, 2020).

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran dari teori Kelembagaan dan Kebijakan Publik tersebut, penelitian berjudul Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang akan menggunakan teori kelembagaan dan kebijakan publik dari Arifin dan Rachbini tersebut paling tepat untuk menganalisis ekonomi politik karena ingin mengetahui masalah sitem pembagian BST di Kota Palembang.

Penelitian ini harus dilakukan kolaborasi antara pihak Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Palembang, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kelurahan maupun RT/RW dan juga masyarakat setempat agar berjalan dengan efektif dan didukung oleh

sistem yang transparansi guna meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat calon penerima Bantuan Sosial Tunai Ini .

## **B. Rumusan masalah**

Dari pembahasan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ekonomi Politik Kebijakan Pada Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang ?
2. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pada Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

Mengetahui Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian ilmu politik, khususnya penelitian dalam kehidupan masyarakat. Saya berharap dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian masa depan tentang bagaimana orang hidup, sehingga mencegah pandemi ini terjadi lagi.
2. Secara praktis : penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi masyarakat terutama dalam peranan pemerintah mengenai bantuan sosial tunai (BST) terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelumnya Peneliti melakukan tinjauan dan menemukan beberapa referensi dari penelitian terdahulu, yang memiliki kesamaan pada fokus yang serupa dengan yang dilakukan oleh penulis, yang ditulis dalam bentuk ringkasan. Sebagaimana yang telah di kemukakan di atas maka Peneliti juga mengkaji informasi dari buku dan makalah untuk memperoleh informasi yang telah tersedia sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul, yang dapat digunakan untuk memperoleh dasar teori-teori ilmiah.

*Pertama*, penelitian ini merujuk pada jurnal Baso Iping mahasiswa Universitas Ekasakti Padang, dengan judul Perlindungan Sosial melalui kebijakan Program bantuan langsung tunai (BLT) di era pandemi covid-19: tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. penelitian ini menganalisis kebijakan perlindungan di Indonesia, perlindungan sosial melalui pembagian BST di masa pandemi covid serta dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi dan sosial. Metode yang dilakukan adalah deskriptif dengan pengumpulan data melalui (studi kepustakaan). Persamaan dengan penelitian sama-sama meneliti BST di masa pandemi yang membedakan dengan skripsi saya adalah Baso Iping meneliti perlindungan sosial sedangkan saya meneliti tentang kebijakan sosial.

*Kedua*, penelitian ini merujuk pada jurnal Puspita Yeni mahasiswi Universitas Brawijaya dengan judul Redistribusi dan Bantuan Langsung Tunai (Perspektif Ekonomi Islam), Puspita Yeni menganalisis mengenai bagaimana program redistribusi dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi literature. Metode ini menggunakan metode kualitatif persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang BST, yang

membedakannya yaitu objek penelitian dan lokasi penelitian.

*Ketiga*, penelitian ini merujuk pada skripsi Nur Azizah Mayasari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19. Nur Azizah menganalisis mengenai persepsi masyarakat terhadap bantuan langsung tunai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang BST, yang membedakannya yaitu objek penelitian dan lokasi penelitian.

## **F. Kerangka Teori**

Istilah “ekonomi politik” yang digunakan dalam teori Marxiam tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang kaitan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berfikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikiran-pemikiran ekonomi klasik terutama, Adam Smith dan David Ricardo (Caporaso dan Levine, 2005:124).

Dalam mekanisme pasar, perekonomian yang ada pada produsen dan konsumen yang saling berinteraksi tidak bisa hanya diserahkan begitu saja, Keikutsertaan pemerintah diperlukan jika didalam perekonomian dipasar tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan guna mengatasi eksternalitas dalam pengadaan barang-barang yang ada di publik. Dari uraian tersebut, jelas ada hubungan antara ekonomi dan politik kelembagaan dan kebijakan publik. Menurut Arifin dan Rachbini (2001), dalam ekonomi politik kelembagaan biasanya didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga

konsumen dan sebagainya. Dengan demikian, pembahasan ekonomi politik kelembagaan berhubungan dengan kebijakan publik mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik.

Kebijakan publik sendiri terkait dengan transaksi institusional yang mendefinisikan kembali domain pilihan keputusan lebih jelas, transaksi institusional adalah perilaku ekonomi saling berkaitan dengan pengaturan kelembagaan, dan dengan maka dari itu perangkat-perangkat pilihan, yang membatasi arena pilihan bagi agen-agen yang memaksimalkan kepuasan individu.

Ada empat jenis transaksi institusional yang menentukan pilihan keputusan pelaku-pelaku ekonomi. Yang *pertama*, terkait dengan hal-hal dimana perubahan institusi akan meningkatkan efisiensi produktif ekonomi. *Kedua*, terkait dengan hal-hal distribusi pendapatan cara sengaja ditingkatkan, apapun alasannya. *Ketiga*, terkait dengan relokasi kesempatan ekonomi, dan *keempat*, terkait dengan redistribusi keuntungan ekonomi.

Dua transaksi institusional yang disebutkan pertama, yaitu meningkatkan efisiensi dan redistribusi pendapatan, sudah lama dikenal dengan ekonomi kesejahteraan. Akan tetapi, dua transaksi institusional yang lainnya, merupan hal-hal baru yang mencerminkan dominan kebijakan publik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian survey. Metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu



menganalisa, menyimpulkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang akan dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang akan diteliti dan terjadi di lapangan sesuai fakta yang dilihat secara langsung. Dasar penelitian survey yang dimaksud yaitu memperoleh gambaran yang jelas mengenai Analisis Politik Ekonomi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan sesuai berdasarkan dengan teori dan konsep data yang didapat. Kemudian peneliti menggunakan metode dilakukan untuk menyelidiki aktivitas dari individu maupun kelompok, berkaitan dengan yang sedang diteliti yaitu mengenai Analisis Politik Ekonomi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang. Kemudian peneliti memaparkan data yang telah dikumpulkan dan dirangkai dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk meneliti objek kajian.

### **1. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer adalah data yang di dapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang yang sedang melakukan penelitian, kumpulan data kuisisioner terhadap responden, data wawancara langsung serta hasil survey. Data sekunder adalah data yang dapat diambil dari pihak atau sumber lain, biasanya data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan data diterima dalam bentuk, misalnya diagram, grafik dan juga tabel.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis. (Prof.Dr.Husaini, MPd, 2014).

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan terhadap konflik yang terjadi, kepentingan-kepentingan yang ada, dan segala yang berkaitan dengan Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang.

### **b. Wawancara**

peneliti juga melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang digunakan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang informan atau responden. Adapun yang menjadi informan atau sumber informasi dari penelitian ini adalah Perwakilan dari Dinas Sosial Kota Palembang (Ranika), Pihak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dita), Kepala Kantor Pos Palembang (Ibu Risdhayati), Akademisi Uin Raden Fatah (Dr. Syawaludin M,Ag), Pengamat Sosial Sumatera Selatan (Rudi Pangaribuan S,Sos) serta masyarakat penerima BST di Kota Palembang. Pada saat melakukan

wawancara peneliti juga merekam untuk mendokumentasikan hasil jawaban dari informan yang telah diwawancara.

### **c. Dokumentasi**

Secara sederhana dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari suatu kegiatan yang menyangkut dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, file, foto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk gambar, jurnal, dan data lain yang berhubungan dengan Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah orang-orang dan segala sesuatu yang terlibat dalam Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang. Seperti Dinas Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 6 Kecamatan yang ada di Kota Palembang berdasarkan sampel dari 18 Kecamatan yang terdiri dari penerima terendah

dan terbanyak, serta Ketua RT/RW dan pihak terkait.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2008).

Teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, antara lain menggunakan 4 tahapan yakni: (Miles. B.Mathew, dan Michael Huberman, 1992).

##### **a. PengumpulanData**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan, dan ditambah dengan observasi secara langsung serta dokumentasi. Hasil dari yang diperoleh tersebut kemudian dicatat, dan dikumpulkan.

##### **b. ReduksiData**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang di dapat dari informan, dan informasi yang peneliti dapat melalui observasi langsung, sesuai dengan

permasalahan yang diteliti.

### **c. Penyajian Data**

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

### **d. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data- data yang telah direduksi atau telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam penyimpulan tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan Laporan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam empat bab, yaitu:

### **BABI PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, lokasi

penelitian, teknik analisa data, dan sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PEMBAHASAN**

Pada bab ini dibahas mengenai kajian kepustakaan yang relevan. Lebih khusus dan lebih fokus membicarakan tentang berbagai materi serta kajian secara teoritis yang berkaitan dengan Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Palembang..

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI**

### **PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian dalam Ekonomi Politik Kebijakan Sosial BST. Lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Palembang, serta masyarakat penerima BST Kota Palembang.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, dibahas mengenai proses analisis dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisis berupa Teori Ekonomi Politik Kelembagaan. Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

#### **A. Konsep Ekonomi Politik Kelembagaan dan Kebijakan Publik**

Perkonomian tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan konsumen yang berinteraksi satu sama lain lewat mekanisme pasar. Di sana sini diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah terutama diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Selain itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi eksternalitas untuk pengadaan barang-barang publik. Adapun berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksanakan pemerintah sesuai institusi ekonomi politik yang ada. Dari uraian tersebut, jelas ada hubungan antara ekonomi politik kelembagaan dengan kebijakan publik.

Menurut Arifin dan Rachbini (2001), penelusuran yang dalam tentang ekonomi politik kelembagaan biasanya didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga konsumen dan sebagainya. Dengan demikian, pembahasan ekonomi politik kelembagaan jelas terkait erat dengan kebijakan publik mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik.

Kebijakan publik sendiri terkait dengan transaksi institusional yang mendefinisikan kembali domain pilihan keputusan lebih jelas, transaksi institusional adalah sebuah kelas tentang perilaku ekonomi sehubungan dengan pengaturan kelembagaan, dan dengan demikian juga terkait dengan perangkat-perangkat pilihan, yang membatasi arena pilihan bagi agen-agen yang memaksimalkan kepuasan individu.



## 1. Perspektif Ekonomi Politik

- a. Aliran ekonomi politik animasi yang dipopulari oleh Edamurd Burke.
- b. Aliran Ekonomi Politik klasik oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior dan JB say.
- c. Aliran ekonomi politik radikal yang dipropagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet dan Karl Marx.

Menurut Rotschild dan Curry Jr (1978:6-9), terdapat ilmu ekonomi politik yang relevan untuk digunakan sebagai alat analisis ekonomi masyarakat, yaitu:

- 1) Penggunaan kerangka kerja ekonomi politik berupaya untuk menerima eksistensi dan validitas dari perbedaan budaya baik formal maupun informal.
- 2) Analisis kebijakan akan memperkuat efektivitas sebuah rekomendasi karena mencegah pemikiran deterministik.
- 3) Analisis kebijakan pengambilan kesimpulan terhadap pergerakan alternatif tindakan berdasarkan perspektif waktu yang sempit.
- 4) Analisis kebijakan yang berfokus pada negara berkembang tidak bisa secara penuh berorientasi pada statistik teoritis.
- 5) Analisis kebijakan lebih mampu menjelaskan interaksi antar manusia.

## 2. Ekonomi Politik

Istilah Ekonomi Politik diambil dari bahasa Yunani, *polis* yang berarti sebuah kota atau sebuah unit politik, dan *oikonomike* yang maknanya mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Kombinasi kedua kata itu mengacu pada

manajemen suatu rumah tangga. Kombinasi kedua kata itu menunjukkan betapa erat keterkaitan antara fakta-fakta produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial. (Lane dan Jan Erik, 1994: 9)

Ekonomi politik, cabang dari ilmu sosial yang kemudian berkembang menjadi ekonomi, menitikberatkan pada peningkatan pendapatan Negara dan peningkatan sumber daya Negara. Istilah ekonomi politik mulai digunakan secara umum pada abad kedelapan belas dan bermakna cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak (secara umum apa yang sekarang disebut kebijakan ekonomi). Dalam perkembangannya, istilah ini mulai diterapkan pada kajian masalah dan persoalan ekonomi lainnya. Ekonomi politik menjadi suatu profesi akademik yang diakui dan semakin dipandang sebagai sains. Namun, dibawah pengaruh W.S Jevons dan Alfred Marshall, “ilmu ekonomi” sebagian besar telah menggantikan “ekonomi politik” pada akhir abad kesembilan belas, kendati sebagian ahli ekonomi tetap membedakan antara keduanya dan melestarikan istilah ekonomi politik untuk masalah-masalah kebijakan.

Perbedaan yang paling signifikan di antara keduanya telah dikaitkan dengan sejarah Marxisme. Pada tahun 1843 Engels menerbitkan artikel dengan judul “*The Outline of a Critique of Political Economy*:. Dia berpendapat bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi baru, yang mendukung kompetisi dan perdagangan bebas, yang dimulai oleh Adam Smith, adalah separuh kemajuan pada hal yang telah berlalu sebelumnya

namun dengan tidak mempertanyakan kekayaan pribadi, merupakan yang salah karena telah menutupi kenyataan bahwa kapitalisme bisa mengarah kepada kejahatan-kejahatan sosial dan ekonomi.

Istilah “ekonomi politik” yang digunakan dalam teori Marxiam tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berfikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikiran-pemikiran ekonomi klasik terutama, Adam Smith dan David Ricardo (Caporaso dan Levine, 2005:124)

Teori Marxim lebih memfokuskan pada proses-proses reproduksi yang bersifat objektif ini tidak memfokuskan telaaahnya pada proses subjektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu. Dalam teori neo-klasik, individu memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dimana kesejahteraan ini didefinisikan berdasarkan peringkat keinginan mereka. Maka hubungan sebab akibatnya adalah kepentingan individu sebagai penyebab, dimana kepentingan individu ini bersifat subjektif, dan struktur ekonomi menjadi akibat (Caporaso dan Levine, 2015:125)

Menurut Staniland dalam Deliarnov (2006:8), Ekonomi Politik memiliki makna sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Namun ada juga pandangan lain jika ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Hal ini dikemukakan Coparaso & Levine dalam Deliarnov (2006:8). Menurutnya ekonomi politik memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai

pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada para penyelenggara Negara. Dalam pemahaman politik sebagai otoritas, hubungan yang terkait antara ekonomi dan politik dapat diartikan sebagai isu hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Penciptaan dan pendistribusian kekayaan terkait erat dalam permasalahan ekonomi, begitu juga dengan penciptaan dan pendistribusian kekuasaan yang terkait dengan politik. Perbedaan antara segi ilmu ekonomi dan ilmu politik sebagai ilmu kekayaan dan kekuasaan sekedar memiliki tujuan analitis. Pada kenyataannya kekayaan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Mohtar Mas'ood dalam Deliarnov, 2006:7).

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas maka ekonomi politik dapat didefinisikan suatu ilmu yang mengkaji tentang berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di suatu Negara dan penyelesaiannya dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan politik sebagai kekuasaan pendukung (*driven force*) untuk memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi. Hubungan antara ekonomi dan politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat keterkaitan kedua disiplin ilmu yang lebih komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization*) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja (Deliarnov, 2006).

Pengambilan keputusan dalam ekonomi cenderung berdasarkan efisiensi, sedangkan pengambilan keputusan politik

lebih menekankan kesamaan antar pelaku politik dalam mengambil keputusan. Di satu pihak, pelaku politik terdiri dari para politisi, partai politik, dan pemerintah, sedangkan di pihak lainnya rakyat sebagai konstituen. Dalam hal ini para politisi dan partai politik akan menawarkan berbagai program kepada rakyat, selanjutnya rakyat yang menginginkan suatu perubahan sesuai program tersebut menyalurkan aspirasinya kepada para politisi dan partai politik.

## **B. Ekonomi Terhadap Kebijakan**

Analisis Ekonomi terhadap kebijakan adalah sebuah kegiatan yang diawali setelah tugas-tugas dalam analisis pilihan publik sudah selesai dilakukan atau paling tidak sudah dipastikan akan dilakukan. Teori pilihan publik adalah metode yang menggabungkan pilihan individu dengan fungsi kesejahteraan sosial dan pilihan publik. Telah diketahui oleh para pembuat keputusan, sehingga tiba saatnya bagi para pembuat keputusan untuk memilih mana dari berbagai alternative kebijakan yang ada bisa memaksimalkan kepuasan (dari mereka yang terpengaruh oleh kebijakan itu, dan bukan sekedar memuaskan para pembuat kebijakan). Maka biarpun ada hubungan yang erat antara teori pilihan publik dengan analisis ekonomi terhadap kebijakan, namun fokusnya berbeda kepada keduanya.

Analisis ekonomi terhadap kebijakan memberikan fokus terhadap individu dalam artian ontologis dan teoritis. Dalam kerangka ini individu menjadi landasan ontologis (faktor yang menentukan apa saja sifat-sifat dasar dari sebuah fenomena-pent).

## **C. Bantuan Sosial Tunai (BST)**

### **1. Pengertian BST**

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Sosial Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. (Edi Suharto, 2011:5).

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. (Edi Suharto, 2011). Dalam merespon kerentanan itu pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Sosial Tunai. Bantuan Sosial Tunai diberikan secara khusus untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Sesuai dengan pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan

sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009:

- 1) Seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- 2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
- 3) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. Bantuan Langsung
  - b. Penyediaan Aksesibilitas: Dan/Atau
  - c. Penguatan Kelembagaan. (Edi Suharto, 2011).

Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2012

Tentang pembinaan dan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial berkaitan dalam Bantuan Sosial Tunai yang diluncurkan Kemensos RI.

Jadi Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah agar dapat membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

**a. Syarat-Syarat Penerima Bantuan Sosial Tunai.**

Berikut ini syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BST)

- 1) Merupakan warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Berstatus bukan sebagai PNS.
- 3) Tidak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
- 4) Tidak menerima kartu prakerja sampai 01 Oktober 2020.
- 5) Berpenghasilan dibawah 5 juta.

## **b. Kesesuaian Data Penerima Bantuan Sosial**

Hasil survey nasional terkait bantuan sosial ini adalah dari 1.235 reponden terdapat sebanyak 96% reponnden yang mengetahui bantuan sosial berupa pembagian bahan kebutuhan pokok (sembako) PKH dan Bantuan Sosial Tunai untuk warga yang kurang mampu, Sebanyak 49% responden menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran dan sebanyak 37% responden menyatakan program bantuan sudah tepat sasaran (saifulmujani.com, 12 Mei 2020). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa bantuan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang rentan. Basis data yang digunakan dalam bantuan sosial hanya mencakup 40% masyarakat miskin (CSIS Commentaries, 15 April 2020) (bdt.tnp2k.go.id). ini berarti data masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 belum termasuk pekerja informal, pekerja yang di PHK, dan masyarakat UMKM.

Pembaharuan data dan ketelitian/sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah Pusat diharapkan memberikan kepercayaan dan melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, serta melibatkan lembaga-lembaga pengawas dan mengontrol untuk meminalisir kesalahan (Cnnindonesia.com, 19 Mei 2020). Hal ini dikarenakan, pembaharuan data selalu menjadi persoalan dalam pemberian bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak tepat manfaat, tidak tepat jumlah dan seterusnya. Padahal masyarakat tertentu sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah. Banyak pembagian bantuan sosial yang tidak sampai kepada yang berhak akibat data yang belum



diperbaharui (Cnnindonesia.com, 19 Mei 2020 dan republika.co.id)

Pembaharuan basis data untuk penerima bantuan seharusnya dibuat lebih mudah dan fleksibel meskipun harus tetap terverifikasi dengan benar. Petugas pembaharuan data baik di lapangan atau dipusat diharapkan memiliki sikap yang responsive dan tegas dalam memili data.

Integrasi data dari setiap kementerian/lembaga, pemerintah pusat maupun daerah sangat penting. Harapan besar dari Presiden Joko Widodo, program bantuan sosial terutama saat pandemi dapat meringankan beban masyarakat yang betul-betul membutuhkan (Kompas, 10 September 2020). Penyatuan data yang baik bukan saja mengintegrasikan dan mensikronkannya, tetapi pembaharuan data sesuai dengan keadaan terkini dan laporan petugas di lapangan/daerah juga harus direspons dengan cepat dan tepat oleh pemerintah pusat.

### **c. Tujuan Bantuan Sosial Tunai ditengah masa Pandemi**

Bantuan Sosial Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial maka tujuan penyaluran bantuan sosial tunai pun tidak lain adalah untuk menjaga dan melindungi warga yang kurang mampu dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Bantuan Sosial Tunai 1 bulan sekali perkartu keluarga untuk mencegah turunya daya minat beli masyarakat. Apalagi wabah penyakit yang tak kunjung usai membuat beberapa sector mengalami tingkat penurunan terutama minat daya beli tersebut.

Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Palembang**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya. Sedangkan Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Politik Kebijakan Sosial Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang..

##### **1. Keadaan Geografi**

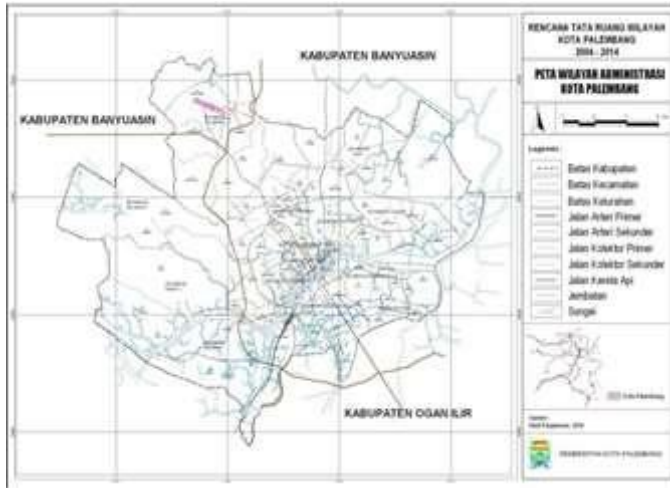
Kota Palembang terletak antara  $2^{\circ} 52'$  sampai  $3^{\circ} 5'$  Lintang Selatan dan  $104^{\circ} 37'$  sampai  $104^{\circ} 52'$  Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undang (PP) Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah  $400,61 \text{ km}^2/40,061 \text{ ha}$ , dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya ( $68,78 \text{ km}^2/17,17\%$ ) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil ( $6,22 \text{ km}^2/ 1,55\%$ ). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan

Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

**Gambar 3.1**

**Peta Wilayah Kota Palembang**



*Sumber : BPS Kota Palembang*

Pada gambar diatas adalah peta wilayah Kota Palembang menjelaskan bahwa Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu batas utara Kabupaten Banyuasin, batas selatan Kabupaten Ogan Ilir, batas timur Kabupaten Banyuasin, dan batas barat Kabupaten Banyuasin Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan, yaitu: Ilir Barat II, Gandus, Seberang Ulu I, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir Barat I, Bukit Kecil, Ilir Timur I, Kemuning, Ilir Timur II, Kalidoni, Ilir Timur III, Sako, Sematang Borang, Sukarami, Alang-Alang Lebar.

**Tabel 3.1**  
**Luas Setiap Kecamatan di Kota Palembang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibu Kota Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>
1	Ilir Barat II	29 Ilir	6.22
2	Gandus	Gandus	68.78
3	Seberang Ulu I	3/4 Ulu	8.28
4	Kertapati	Karya Jaya	42.56
5	Jakabaring	15 Ulu	9.16
6	Seberang Ulu II	14 Ulu	10.69
7	Plaju	Plaju Ilir	15.17
8	Ilir Barat I	Bukit Lama	19.77
9	Bukit Kecil	26 Ilir	9.92
10	Ilir Timur I	20 Ilir D III	6.50
11	Kemuning	Kemuning	9.00
12	Ilir Timur II	3 Ilir	10.82
13	Kalidoni	Kalidoni	27.92
14	Ilir Timur Tiga	8 Ilir	14.76
15	Sako	Sako Baru	18.04
16	Sematang Borang	Sri Mulya	36.98
17	Sukarami	Kebun Bunga	51.46
18	Alang-alang Lebar	Talang Kelapa	34.58
	Palembang	Palembang	400.61

*Sumber* : BPS Kota Palembang

## **2. Wilayah Administratif**

Kota Palembang merupakan suatu daerah Tingkat II yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974.

Berdasarkan Peraturan Daerah (BPD) Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 tentang pemekaran kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan dari 14 Kecamatan dan 103 Kelurahan menjadi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan. Dua kecamatan pemekaran tersebut adalah, Kecamatan Alang-Alang Lebar yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Sematang Borang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sako.

Sementara 4 kelurahan yang baru adalah Kelurahan Talang Jambe yang merupakan pecahan Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi yang merupakan pecahan Kelurahan Alang-Alang Lebar, Sako Baru pecahan dari Kelurahan Sako, dan terakhir Kelurahan Karya Mulya pecahan dari Kelurahan Sukamulya.

Pada Tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 136/4123/BAK, wilayah administrasi Kota Palembang kembali mengalami pemekaran kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga**  
**di Kecamatan Kota Palembang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Rukun Warga</b>	<b>Rukun Tetangga</b>	<b>Keluarga</b>
1	Ilir Barat II	7	51	206	23.631
2	Gandus	5	38	184	22.297
3	Seberang Ulu I	5	53	249	16.079
4	Kertapati	6	50	257	31.847
5	Jakabaring	5	45	216	13.601
6	Seberang Ulu II	7	57	263	45.178
7	Plaju	7	62	234	21.227
8	Ilir Barat I	6	67	301	22.670
9	Bukit Kecil	6	39	156	8.737
10	Ilir Timur I	11	66	264	10.660
11	Kemuning	6	51	200	31.541
12	Ilir Timur II	6	44	191	27.623
13	Kalidoni	5	41	244	36.585
14	Ilir Timur Tiga	6	36	179	12.112
15	Sako	4	62	271	23.594
16	Sematang Borang	4	26	130	10.423
17	Sukarami	7	70	387	42.794
18	Alang-alang Lebar	4	50	237	32.946
	Jumlah/Total	107	908	4.169	433.545

**Sumber : BPS Kota Palembang**



### **3. Kependudukan**

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.643.488 jiwa yang terdiri atas 824.086 jiwa penduduk laki-laki dan 819.402 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,42%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,57% yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2018 mencapai 4.102 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 12.048 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 945 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 3.3****Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Iilir Barat II	36.289	36.098	72.387
2	Gandus	33.067	31.926	64.994
3	Seberang Ulu I	46.905	46.107	93.013
4	Kertapati	46.277	44.700	90.978
5	Jakabaring	46.564	45.608	92.172
6	Seberang Ulu II	53.227	52.588	105.815
7	Plaju	44.901	44.743	89.643
8	Iilir Barat I	69.927	70.006	139.933
9	Bukit Kecil	24.503	25.154	49.657
10	Iilir Timur I	38.194	40.122	78.314
11	Kemuning	46.322	46.525	92.846
12	Iilir Timur II	47.319	47.491	94.810
13	Kalidoni	56.244	55.447	111.691
14	Iilir Timur Tiga	42.561	42.376	84.938
15	Sako	46.155	46.146	92.301
16	Sematang Borang	18.168	17.864	36.033
17	Sukarami	78.619	77.890	156.509
18	Alang-alang Lebar	48.844	48.611	97.455
	Jumlah	824.086	819.402	1.643.488

*Sumber* : BPS Kota Palembang

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk Perempuan Pada tahun 2018. Penduduk Laki-laki 824.086 jiwa sedangkan penduduk perempuan 819.402 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan 1.643.488 yang ada di 18 kecamatan kota Palembang. untuk penduduk yang paling

sedikit ada di kecamatan Sematang Borang yang hanya 36.033 jiwa. Sedangkan untuk penduduk yang paling banyak ada di kecamatan Sukarami 156.509 jiwa.

**Tabel 3.4**  
**Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kota Palembang**

Kota	2015		2016		2017		2018	
	Angka Melek Huruf		Angka Melek Huruf		Angka Melek Huruf		Angka Melek Huruf	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Palembang	99.41	99.31	99.67	98.76	99.79	99.60	99.83	99.69

*Sumber* : BPS Kota Palembang

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk laki-laki angka melek hurufnya lebih tinggi dibandingkan dengan angka melek huruf perempuan yang ada di Kota Palembang. Angka melek huruf di Kota Palembang setiap tahunnya meningkat, dapat dilihat untuk angka melek huruf laki-laki pada tahun 2015 tercatat 99,41 hingga pada tahun 2018 terus meningkat menjadi 99,83. Namun untuk angka melek huruf perempuan mengalami turun-naik, seperti pada tahun 2015 tercatat 99.31 menurun pada tahun 2016 menjadi 98,76 lalu pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 99,60 dan 99,69.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oleh sebab itu, perlu diadakan pemilihan

umum untuk menentukan siapa pemimpin yang akan memegang dan mengendalikan kekuasaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, yang diselenggarakan dalam pemerintah Negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

**Tabel 3.5**

**Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kota Palembang dalam Partai Politik**

No	Partai Politik	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Demokrat	8	1	9
2	Gerindra	7	1	8
3	PDI Perjuangan	7	-	7
4	PAN	6	-	6
5	PKB	5	1	6
6	Golkar	5	-	5
7	PKS	4	1	5
8	Nasdem	3	-	3
9	PPP	1	-	1

*Sumber: BPS Kota Palembang 2020*

## **B. Dinas Sosial**

### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang**

Dinas Sosial Kota Palembang mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang sosial
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan dibidang sosial;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang**

### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

### **b. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perencanaan ,keuangan, dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- 2) Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran
- 4) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
- 5) Pelaksanaan urusan kehumasan; dan
- 6) Pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

## C. Visi Dan Misi

### 1. Visi.

Adapun Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2018-2023 adalah **"Palembang Emas Darussalam 2023"** Yaitu :

- a. **Elok:** Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.
- b. **Madani :** Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.
- c. **Aman:** Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal

dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.

**d. Sejahtera:** Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

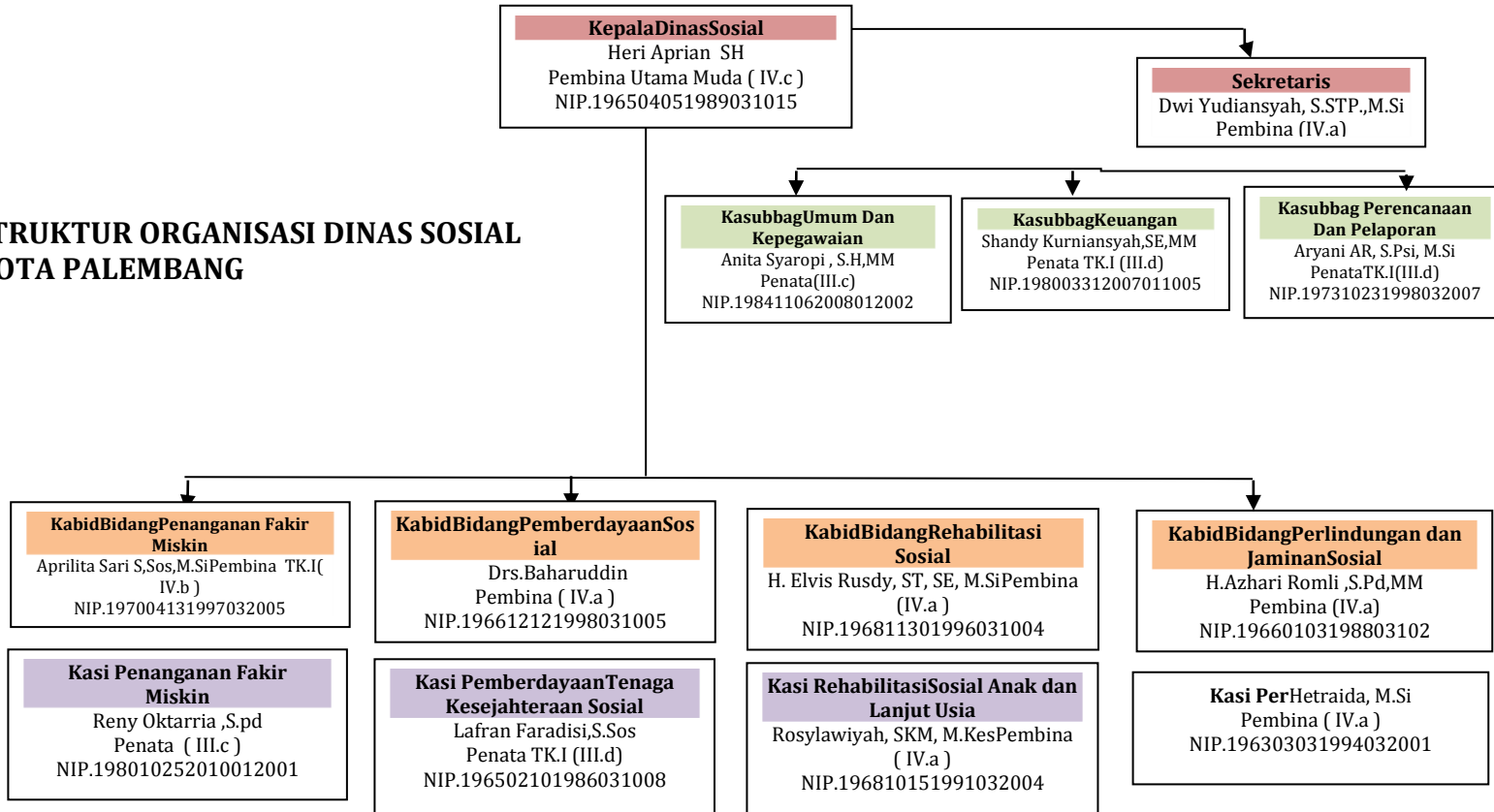
**e. Darussalam:** Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

## 2. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Sosial Kota Palembang, dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawadan profesional.
- b. Mewujudkan Ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG





**Kasi Data dan Informasi**  
Sri Munzilah, SE  
Penata TK.I(III. d)  
NIP. 196503161989032007

**Kasi Pemberdayaan  
Kelembagaan Sosial**  
BambangIrawan, SE  
PenataTK.I ( III.d )  
NIP.197108181993031007

**Kasi Rehabilitasi Sosial  
Penyangang Disabilitas**  
Hj. Ana Rosmi Z, M.Si  
Pembina ( IV.a )  
NIP.196411211985032004

**Kasi Jaminan Sosial dan Keluarga**  
Merry Ari Santy, SH, M.Si  
Penata TK.I ( III.d )  
NIP.197905122008012009

**Kasi Pendampingan dan  
Bantuan Stimulan**  
Ahmad Syaufan, SE., M.Si  
Pembina (IV.a)  
NIP.196801191993031003

**Kasi Pemberdayaan Potensi,  
Kesetiakawanan & Restorasi  
Sosial**  
Nur Holis, SE., MM  
Penata TK. I (III.d)

**Kasi Rehab. Sosial Tuna Sosial &  
Korban Perdagangan Orang**  
Yudhi Irawan, S.Kom, MM  
Penata TK.I( III.d )  
NIP. 198207052006041006

**Kasi Kesejahteraan Sosial**  
Drs.SyahrulOstman, MSi  
Pembina ( IV.a )  
NIP.196310011985031007

**Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang**

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan tentang bagaimana ekonomi politik kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi yang ada di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara.

Landasan pemikiran dari teori ekonomi politik kelembagaan tersebut kemudian diolah peneliti untuk mempermudah menganalisis satu permasalahan yang akan dijawab yaitu, Bagaimana Ekonomi Politik Kebijakan Sosial Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi yang ada di Kota Palembang.

#### **A. Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang**

Ekonomi Politik sendiri merupakan penelusuran yang dalam tentang ekonomi politik kelembagaan biasanya didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga konsumen dan sebagainya. Dengan demikian, pembahasan ekonomi politik kelembagaan jelas terkait erat dengan kebijakan publik mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik.

Kebijakan publik sendiri terkait dengan transaksi institusional yang mendefinisikan kembali domain pilihan keputusan lebih jelas, transaksi institusional adalah sebuah kelas tentang perilaku ekonomi sehubungan dengan pengaturan kelembagaan, dan dengan demikian juga terkait dengan perangkat-perangkat pilihan, yang membatasi arena

pilihan bagi agen-agen yang memaksimalkan kepuasan individu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan salah satunya mengeluarkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19.

Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan guna meringankan beban masyarakat karena terjadinya bencana Covid-19. Maka dari itu muncul bantuan ini sebesar 600 ribu rupiah perbulan bagi masyarakat yang terdampak, karena adanya bencana Covid-19 ini. Data penerima bantuan sosial tunai ini langsung ditetapkan dan dipilih oleh Kementrian Sosial (Kemensos) untuk Dinas Sosial sebagai monitoring, sedangkan untuk penyaluran dilakukan oleh pihak Kantor Pos. Untuk tahun 2020 dimulai pada gelombang 1-3 dibulan (April, Mei, Juni) sebesar Rp 600.000 sedangkan dibulan berikutnya dilakukan pengurangan Rp 300.000 per-bulan hal ini dikarenakan pihak kemensos, tujuan mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM). **Pengelola Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Perubahan Institusi Guna Meningkatkan Efisiensi Produktif Ekonomi di Kota Palembang**

Kelembagaan amat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus dan tidak harus mengerjakan sesuatu (kewajiban atau tugas), bagaimana mereka boleh mengerjakan sesuatu tanpa intervensu dari orang lain (kebolehan atau *liberty*), bagaimana mereka dapat mengerjakan sesuatu dengan bantuan kekuatan kolektif (kemampuan atau hak), dan bagaimana mereka tidak dapat memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas namanya ketidakmampuan. Dalam bahasa lebih formal, kelembagaan dapat digambarkan sebagai serangkaian hubungan keteraturan antara beberapa orang yang menentukan hak, kewajiban- serta kewajiban

menghargai hak orang lain-privilis, dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut (Bromley, 1989).

Di dalam pengelolaan mekanisme pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) merujuk dari peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease. Peraturan menteri keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan dan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Corona Virus Disease.

Perubahan Institusi Guna Meningkatkan Efisiensi Produktif Ekonomi memiliki karakteristik Institusi yang baik dan perubahan institusi yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga hak kepemilikan (*property rights*) untuk segenap masyarakat sehingga setiap individu memiliki insentif untuk melakukan investasi dan ambil bagian di dalam kegiatan perekonomian.
- b. Membatasi tindakan para kelompok elite, politisi dan kelompok-kelompok kuat lainnya sehingga orang tersebut tidak bisa merampas sumber pendapatan dan investasi orang lain atau menciptakan kesempatan yang tidak sama bagi semua orang.
- c. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat sehingga setiap individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal insan dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Seiring terjadinya proses transformasi ekonomi, sosial dan politik dalam suatu masyarakat yang menyebabkan

berkembangnya kebutuhan dan keragaman manusia, institusi pun mengalami perubahan. Secara rinci, North (1990) dalam Arsyad (2010) mengungkapkan lima penyebab perubahan institusi tersebut, yaitu :

- 1) Adanya interaksi yang terus menerus antara institusi dengan organisasi dalam kondisi kelangkaan secara ekonomis sehingga menimbulkan persaingan merupakan faktor kunci bagi perubahan institusi adalah aturan main baik formal maupun informal, yang secara bersama-sama menentukan cara bermain. Organisasi adalah pemainnya (players). Organisasi terbentuk dari kelompok individu yang mempunyai tujuan yang sama. Organisasi-organisasi ekonomi terdiri dari, misalnya: perusahaan-perusahaan, asosiasi perdagangan dan koperasi. Tujuan antara dari organisasi bisa saja memaksimalkan laba atau (bagi perusahaan) atau perbaikan sistem pemilihan umum (untuk partai politik), tetapi tujuan akhir dari sebuah organisasi adalah bertahan hidup (survival) karena semua organisasi hidup dalam dunia yang penuh kelangkaan dan persaingan.
- 2) Adanya persaingan yang disebutkan di muka akan mendorong organisasi-organisasi untuk secara terus menerus berinvestasi dibidang penciptaan keahlian dan pengetahuan baru agar tetap bisa bertahan hidup. Jenis keahlian dan pengetahuan individual serta organisasinya akan membentuk persepsi tentang peluang-peluang dan pilihan-pilihan dan secara perlahan akan mengubah institusi.
- 3) Adanya kerangka institusional yang menciptakan sistem insentif yang mempengaruhi lahirnya keahlian dan pengetahuan yang dianggap menghasilkan hasil yang optimal. Arah dari investasi

untuk pengembangan dengan cara pengembangan dan pengetahuan mencerminkan struktur insentif. Misalnya, jika ada tingkat kembalian hasil yang tinggi untuk kegiatan produktif tertentu maka dapat diharapkan dapat bahwa organisasi-organisasi menginvestasikan dananya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang akan produktivitas di kegiatan produktif tersebut.

- 4) Adanya persepsi yang dibangun dari sikap mental para pelaku ekonomi.

Faktor utama yang mempengaruhi pilihan seorang individu akan suatu hal dipengaruhi oleh persepsi individu tentang kemungkinan hasil dari pilihan tersebut. Persepsi itu sendiri dibentuk oleh cara ataupun sikap dari setiap individu dalam menginterpretasikan setiap informasi yang mereka peroleh.

Cara atau sikap tersebut tentu saja dibentuk oleh kebiasaan, budaya dan tata nilai yang dianut oleh individu tersebut.

- 5) Adanya cakupan ekonomi (*economies of scope*), komplementaritas, dan eksternalitas jejaring dari suatu matriks institusional membuat perubahan institusional cukup besar dan *path dependence*. Dalam setiap aktivitasnya, setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya dan kemudian mereka membuat semacam jejaring (*networking*) di antara mereka. Adanya perubahan pola perilaku pada satu individu dalam jejaring tersebut tentu saja akan mempengaruhi perubahan pola perilaku jejaring secara keseluruhan, karena adanya sifat saling terkait (*complement*) di antara mereka. Pada

akhirnya perubahan tersebut akan membawa pengaruh yang cukup besar pada perubahan institusi.

Dalam hal ini terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pembagian Bantuan Sosial Tunai yang dimana orang-orang tersebut bisa mengarahkan peningkatan produktif ekonomi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.

Pengelola Bidang Bantuan Sosial Tunai di Dinas Sosial Kota Palembang dalam wawancara penelitian pada Senin, 15 Maret 2021, pukul 13.39 WIB, Ranika mengatakan bahwa:

*"Dinas Sosial mengawasi pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagai monitoring nama penerima dari pihak kantor pos dan bekerja sama dengan pihak kelurahan. Jika ada yang tidak layak di stop dan digantikan dengan yang lebih membutuhkan, untuk pengurangan dana dari anggaran kementerian langsung".*

Dalam dunia birokrasi (pemerintahan), "prosedur" biasanya merupakan kebijakan. Untuk mempromosikan dan memahami isi program (kebijakan pemerintah), program biasanya digambarkan dalam berbagai bentuk item kegiatan. Item kegiatan ini kemudian akan menjadi patokan untuk prosedur yang relevan, terlepas dari apakah prosedur tersebut dapat dilaksanakan (dilaksanakan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penyaluran dan mekanisme pembagian BST dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah bahwa data calon penerima BST ini ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, untuk terus melakukan update data yang diberikan selama masa pandemi, agar tidak ada simpang siur terkait kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) (Merdeka.com). Sedangkan Dinas Sosial Kota Palembang hanya mengawasi dan memantau data

penerima program BST agar mekanisme pembagian program tersebut berjalan dengan efektif. Untuk bagian teknis-teknis penyaluran dilakukan oleh Bank Himbara dan Kantor Pos Palembang sesuai jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa untuk melaksanakan suatu kebijakan yang sempurna, perlu saling berkerjasama agar terjadinya kelancaran pembagian tentang BST agar tepat sasaran. Maka dari itu konsep tersebut akan memudahkan dalam melaksanakan program bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak di masa pandemi. Dengan demikian, langkah selanjutnya ialah "bekerja sama" antara pihak tingkat RT/RW, Kelurahan, Dinas Sosial dan Pihak Kantor untuk membuat rencana berhasil baik di tingkat pembuatan kebijakan maupun di tingkat operasional untuk kelancaran bersama.

Dinas sosial dalam melengkapi data penerima BST di kota Palembang agar efektif dan tepat sasaran dilakukan juga kerjasama atau kolaborasi dari tingkat terbawah yakni RT maupun Kelurahan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai ke Dinas Sosial serta Kementerian Sosial.

Dalam wawancara penelitian pada Jumat, 11 Juni 2021, pukul 13.39 WIB, Ranika menambahkan bahwa:

*“Dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dengan tingkat kelurahan dan data terpadu kesejahteraan sosial untuk pendataan masyarakat yang mengalami PHK dan terdampak pandemic Covid-19 yang terdata dan mendaftar di DTKS untuk diserahkan ke kementerian sosial (kemensos). Agar dilakukan pendataan sesuai syarat penerima bantuan sosial tunai ini dan tidak menerima bantuan PKH”*



Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa perlu adanya kesadaran sosial apalagi dimasa pandemi sekarang banyak orang yang terdampak krisis ekonomi dikalangan masyarakat menengah kebawah yang sangat membutuhkan. Maka dari itu, pihak yang terlibat dalam bantuan ini saling bekerjasama agar tidak terjadinya ketimpangan sosial dan sesuai dengan kondisi penerima yang ada.

Dinas sosial dalam hal ini melakukan kerjasama dengan pihak kantor pos untuk melakukan pembagian dan pengawasan agar sesuai data penerima bantuan sosial tunai tersebut. Kemudian agar data sesuai dengan calon penerima dilakukan koordinasi antara pihak aparat desa atau kelurahan setempat, agar dilakukan pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut hasil webinar menjadi peserta yang dilakukan Forum Diskusi Sumatera Selatan (FDSS) dengantema “Efektifitas BST Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19” Bersama Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan M. Irwansyah mengatakan :

*“Bahwa strategi pelaksanaan BST agar tepat sasaran itu harus memverifikasi sesuai data penerima, kemudian pada saat mendapatkan harus sesuai KTP penerima, jika penerima sudah lanjut usia maka pengambilan dana BST bisa diwakilkan, dan dalam Kartu Keluarga maksimal satu orang dalam satu kepala keluarga yang menerima. Tidak ada pengurangan pada saat menerima bantuan tersebut, data harus diperbaharui dan jangan sampai dijadikan proyek atau alat politik untuk menguntungkan kepentingan individu atau kelompok”.*

Dari hasil menjadi peserta webinar tentang BST, bahwasannya strategi yang dilakukan pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial

bekerjasama dengan Kantor Pos harus saling berkontribusi dengan jujur dan amanah supaya tidak dijadikan kepentingan individu dan kelompok.

Mekanisme penyediaan data penerima dan koordinasi dari pihak instansi yang terkait merupakan cara agar bantuan sosial tunai ini dilakukan secara baik, jujur dan amanah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak terkait yang meliputi kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial, DTKS, Kelurahan, maupun RT/RW setempat.

*“Dinas sosial sebagai monitoring pembagian bantuan sosial tunai pembagian dilakukan oleh Kantor Pos, dan Bank Himbara untuk data penerima bantuan ini didata langsung oleh RT/RW setempat kemudian diserahkan kepihak Klurahan dan dilakukan pendataan kembali oleh DTKS dan akan diserahkan ke Kementerian Sosial untuk kemudian di data dan di serahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai mekanisme penyediaan data penerima BST maka harus di monitoring langsung oleh pihak yang berwenang serta terkait dalam pembagian BST yang ada di Kota Palembang, agar tidak terjadi pendataan yang kurang tepat dan tidak terjadi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

Pembagian BST dimulai dari awal April 2020 sampai April 2021 karena tidak anggaran untuk BST karena minimnya dana tidak relevan pasalnya sepanjang tahun 2021 ada anggaran pemulihan ekonomi nasional yang meningkat mencapai 700 triliun rupiah, dari jumlah itu sebanyak 125 triliun rupiah diantaranya diperuntukan untuk modal BUMN dan penempatan dana di perbankan

*“Informasi yang didapatkan di stop dan dilakukan penghentian dibulan april 2021 dan tidak ada bantuan sosial tunai ini dialihkan ke bantuan lainnya alasan menteri sosial tri rismaharani menghentikan bantuan sosial tunai ini karena minimnya dana tidak relevan pasalnya sepanjang tahun 2021 ada anggaran pemulihan ekonomi nasional yang meningkat mencapai 700 triliun rupiah, dari jumlah itu sebanyak 125 triliun rupiah diantaranya diperuntukan untuk modal BUMN dan penempatan dana di perbankan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa seharusnya pemerintah dalam hal ini menteri sosial memaksimalkan agar bisa mempertahankan bantuan sosial tunai ini, karena bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat serta pemulihan ekonomi sosial.

### **1. Redistribusi Keuntungan Ekonomi Pada Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang**

Redistribusi keuntungan ekonomi ialah pendapatan kembali dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial kepada masyarakat. redistribusi bisa dibagi menjadi dua yakni, redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal.

Menurut penelitian yang disampaikan Akademisi Uin Raden Fatah Palembang, Dr. Muh. Syawaluddin, M. Ag memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan pada saat zoom di webinar Efektivitas BST Bagi Masyarakat Kota Palembang memberikan masukan karena ditemukan beberapa kekurangan dalam pembagian BST diantaranya :

*“Data yang kurang tepat, karena proses data yang sangat kacau diambil pada tahun 2015 tidak update maupun data terbaru. Kemudian keluhan masyarakat yang harusnya kurang mampu itu mendapatkan malah tidak dapat. Kendalanya ada data penerima yang sudah meninggal dan pindah rumah masih dapat. Lalu muncul kecemburuan sosial yang terjadi di kalangan penerima karena di bulan kemudian tidak mendapatkan Kembali BST. Kurangnya koordinasi antara RT setempat dengan Kelurahan sehingga ada di Kecamatan Kalidoni salah satu Kelurahan tidak tahu jumlah data penerima BST.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa banyak terjadi hambatan di pelaksanaan BST ini, karena dialami dimasa pandemic seperti ini sehingga kesadaran masyarakat mengalami kekurangan disegala sector yaitu data penerima yang lama, pengurangan dana, kurang kesadaran prokes (protocol kesehatan), serta kurang koordinasi antara pihak RT/RW dengan kelurahan sehingga memunculkan hambatan yang terjadi di pelaksanaan dan pembagian BST di Kota Palembang.

Bantuan Sosial Tunai (BST) memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka.

Menurut penelitian yang disampaikan mengenai tanggapan dan respon dari Kepala Kantor Pos, Ibu Risdhayati terhadap Kendala yang ada di dalam pembagian BST di Kantor Pos melalui webinar tentang BST Hasil :

*“Ada beberapa kendala berupa Kartu Keluarga yang double, data penerima sudah meninggal, sudah menerima bantuan*

*lainnya, serta data KTP dengan yang mengambil tidak sesuai identitas.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Palembang yang diolah Kantor Pos mempunyai kendala dan masalah tersendiri. Hal ini terjadi karena pengambilan proses calon penerima yang didata belum berjalan dengan baik dan maksimal.

Program BST juga merupakan program pemerintah secara teoritis sesuai dengan konsep redistribusi dibahas secara lebih luas melihat permasalahan ekonomi yang terjadi adalah ketidakadilan dalam masyarakat akibat terjadinya ketimpangan distribusi karena kebijakan ini diambil dengan mendahulukan kemasalahatan mayoritas daripada kemasalahatan minoritas. Sedangkan apabila ditinjau dari jaminan sosial kebijakan ini hanya bersifat sporadis dan kebijakan ini terlaksana akibat terjadinya tekanan perekonomian di masa pandemi.

## **2. Relokasi Kesempatan Ekonomi Pada Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang**

Beberapa negara memiliki mekanisme pengalokasian anggaran kedaruratan yang lebih fleksibel karena kendala politik yang rendah (kompromi politik yang relatif mudah) dan cadangan keuangan yang cukup. Dua unsur itu penting ketika berbicara soal anggaran publik untuk bencana, karena dukungan politik di lembaga perwakilan dan kepercayaan publik menjadi unsur penting bagi pemerintah untuk mengatasi pandemi (segi kesehatan publik) dan juga kekuatan massif dari dampak jangka panjang terhadap depresi ekonomi pasca pandemi.

Pemerintah perlu mengarahkan anggaran pada hal-hal yang dapat mencegah penyebaran penularan pada satu sisi, tetapi menciptakan stimulus bisnis berbasis kekuatan ekonomi dalam negeri. Pendapatan negara harus mencari sumber-sumber non konvensional karena perlu relaksasi pada pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak lain yang terkait transaksi ekonomi.

Menurut Binsar M. Gulton dalam Lusiani (2008:14) mengatakan bahwa secara umum pengertian relokasi sering dimaknai sekedar sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografis. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa relokasi menyangkut pertarungan antar berbagai konsep ruang seperti ruang ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup hingga ke ruang budaya. Sedangkan menurut Davidsson dalam Lusiani (2008:14) mengatakan bahwa lokasi dan kualitas tempat relokasi adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal seperti kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawaasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan sosial, budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemulihan pendapatan berhasil.

Selama ini, pemerintah telah menyalurkan BST lebih kurang Rp 12 Triliun perbulan ke sekitar 10 juta keluarga manfaat. BST dimaksudkan sebagai dana bantuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam

memenuhi kebutuhan dasarnya selama pandemi Covid-19. Paling tidak, mereka tak kian terpuruk dalam kemiskinannya.

Ternyata masih ada masyarakat yang belum mendapatkan atau menerima bantuan sosial tunai, padahal sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, ini disebabkan oleh beberapa hal. Hal tersebut diungkapkan oleh Dita selaku anggota DTKS di Kecamatan Kemuning, mengatakan bahwa :

*”pengambilan data yang diambil merupakan data lama tahun 2015 di DTKS dan diserahkan ke Kemensos sehingga kurang pembaharuan masyarakat miskin yang dibutuhkan pada 2020 maka dari itu pihak DTKS melakukan pendataan dengan bekerjasama dengan pihak seperti RT/RW dan kelurahan agar terjadi penerima yang terbaru guna membantu masyarakat yang sangat memerlukan Bantuan Sosial Tunai.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai data penerima bantuan sosial tunai ini bahwa pihak DTKS dan Kelurahan maupun RT/RW memverifikasi kembali data yang lama karena sudah 5 Tahun, belum dilakukan pendataan ulang sehingga tidak terjadi calon penerima yang belum terdaftar di Dinas Sosial sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat karena Bantuan Sosial Tubai harus digunakan secara efektif dan bermanfaat. Maka dari itu harus adanya tingkat kerjasama yang solid jujur dan amanah.

Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ialah yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima BST ialah warga yang dianggap layak menerima

bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi Covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (*by name by address*), NIK dan nomor handphone, kemudian BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial, Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut hasil wawancara dengan Dita selaku anggota Data Kesejahteraan Sosial (DTKS), kriteria calon penerima bantuan sosial tunai itu:

*“Calon penerima merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan Rt/Rw setempat, dan mereka yang kehilangan mata pencaharian karena dampak pandemi, tidak terdaftar sebagai bantuan langsung tunai lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kartu prakerja, tidak mendapatkan bansos maka bisa langsung melapor ke aparat desa seperti RT/RW atau kelurahan setempat, serta calon tersebut harus memenuhi syarat tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap bisa mendapat bantuan tetapi harus berdomisili di alamat tersebut. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer rekening bank penerima dan tunai boleh mengambil langsung di kantor pos terdekat.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasannya Dinas Sosial, Kantor Pos, Aparat Desa dan Kelurahan sudah melakukan koordinasi agar berjalan secara efektif, maka dari itu pihak terkait tetap



berkoordinasi dan bekerjasama guna mengatasi kekurangan dan kekeliruan kriteria calon penerima BST.

Di dalam program BST yang dikelola pemerintah dan diamanahkan melalui Kementerian Sosial, serta harus dilakukan kerjasama semua pihak yang terlibat dari mulai RT/RW, Kelurahan, DTKS, Dinas Sosial, Kemensos serta masyarakat itu sendiri. Menurut penelitian pengamat sosial Rudi Pangaribuan dalam webinar Efektifitas BST Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 yang dilakukan via zoom pada Kamis, 11 Februari 2021, menanggapi bahwa :

*“Perlu adanya evaluasi agar pendataan dan penyaluran terkontrol dengan baik serta tranparansi guna tidak terjadi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Peran baik dan calon penerima tepat sasaran.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa program BST agar berjalan dengan efektif harus dilakukan evaluasi kembali agar pendataan sesuai dengan kriteria calon penerima BST, hingga tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kendala yang merugikan bagi kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sosial tunai ini dan dapat menimbulkan kepercayaan dan respon masyarakat yang baik.

Peran Elit Politik dalam Bantuan Sosial Tunai dalam hal ini saya mewawancarai ketua DPC PKB Kota Palembang sekaligus anggota DPRD Kota Palembang fraksi PKB mengatakan

*“Bantuan sosial tunai ini merupakan bantuan hang diberikan langsung guna meringankan ekonomi yang terjadi di masyarakat kalangan kebawah maka dari itu saya selaku anggota DPR menekankan pada pemerintah daerah dan dinas sosial harus*

*saling berkoordinasi agar bantuan tersebut berjalan dengan efektif”.*

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya elit politik terus mengawasi mekanisme bantuan sosial ini guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## **B. Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang Keseimbangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Terkena Dampak Pandemi Covid-19**

Dalam masa pandemi Covid-19 ini masyarakat di Kota Palembang mengalami kesulitan di berbagai sektor termasuk kesulitan perekonomian dimana beberapa keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta berkurangnya daya beli masyarakat karena sedang adanya krisis perekonomian, maka dari itu pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden IR.H. Joko Widodo melalui Kementerian Sosial Juliandri Batubara memberikan keringanan bantuan berupa BLT yang dikelompokkan menjadi beberapa bantuan lainnya terutama BST, dimana bantuan ini berupa uang atau dana langsung yang diberikan kemasyarakat Indonesia, termasuk pada kebijakan Pemerintah Kota Palembang.

Bantuan Sosial Tunai (BST) memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka.

Menurut penelitian yang disampaikan menemukan tanggapan dan respon masyarakat terhadap BST melalui hasil wawancara yang didapat. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Sako Kelurahan Sukamaju Agus yang diwawancarai di kediamannya. Beliau mengatakan :

*“Ketika ada pembagian Bantuan Sosial Tunai seperti tahun yang lalu, kami merasa terbantu. Uang itu kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari didapur”. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang sebesar Rp. 300.000,- digunakan untuk apa saja, Agus mengatakan “uang itu hanya cukup membantu untuk kebutuhan sehari-hari.”*

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Maya ketika ditemui didepan warungnya ia menjelaskan bahwa *“uang BST saya pakai sebagai modal tambahan berjualan, saya memiliki warung ini, jadi uang BST saya pakai untuk tambahan modal jualan”*.

Sedangkan Yuli menyampaikan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Agus bahwa dalam penuturannya beliau mengatakan *“uang BST saya pakai untuk membeli sembako”*. Ditempat yang sama juga Yuli mengatakan :

*“Saya memanfaatkan uang BST untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena jumlah uang itu tidak cukup untuk dijadikan modal usaha. Seandainya dicairkan seklaigus maka uang itu bisa dijadikan modal usaha, akan tetapi pencairannya setiap tiga bulan sekali”*.

Jika dianalisa semua informasi yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Sosial Tunai memang digunakan untuk kebutuhan mendasar. Karena jumlahnya yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengemban usaha ataupun peningkatan kualitas hidup.

Salah satu tokoh masyarakat Yayang selaku Ketua RT yang diwawancarai tentang dampak BST terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kemuning Yayang menegaskan:

*“Program BST memang bagus dan membantu masyarakat miskin terutama untuk kebutuhan pokok. Akan tetapi jika ditanya apakah BST berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya berdasar apa yang saya lihat sehari-hari tidak ada perubahan kualitas hidup apalagi peningkatan kesejahteraan. Ada dua orang tetangga saya yang mendapat BST, tetapi kondisi hidupnya tidak ada perubahan. Karena memang sulit bagi mereka memperbaiki nasib dengan bantuan dana yang sangat minim. Malahan akan lebih baik jika dana seperti ini diarahkan pada pembangunan lain, misalnya pembangunan infrastruktur. Mengingat banyak jalan yang rusak”.*

Hal ini dibenarkan oleh Juliarti beliau mengatakan :

*“Uang BST sebesar Rp. 300.000 setiap satu bulan sekali tidak dapat meningkatkan kesejahteraan kami sebagai masyarakat miskin. Karena uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan mendasar. Itupun tidak cukup untuk satu bulan, apalagi bagi keluarga yang banyak tanggungannya. Jadi susah bagi kami untuk memperbaiki ekonomi dengan uang itu. Untuk modal menjual sayur saja kami butuh modal jutaan rupiah. Selama ini saya berjualan sayur, tapi punya orang. Saya hanya mendapat bagian dari hasil jualan”.*

Hal yang sama juga di katakan oleh Maya yang pernah memakai uang BST untuk tambahan modal usaha. Maya mengatakan:

*“BST tidak bisa menghilangkan kemiskinan, apalagi menjadikan kami hidup sejahtera. Walaupun kami mendapatkan BST tapi kami tidak bisa dengan hanya mengandalkan uang BST untuk membangun hidup. Uang BST hanya cukup membantu sesaat saja”.*

Dari berbagai pandangan diatas bahwa memang pada dasarnya BST dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi, terutama seperti sekarang terjadi pandemic covid-19. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat incidental. Artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang, dapat menarik kesimpulan bahwa menurut teori yang dikemukakan oleh Arifin dan Rachbini (2001) ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan publik membahas tentang proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasi kebijakan publik.

1. Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang Pengelolah Bantuan Sosial Tunai dan perubahan institusi guna meningkatkan efisiensi produktif ekonomi di Palembang. Maka penyaluran dan pembagian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah bahwa data calon penerima ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dinas sosial mengawasi dan memantau data agar pembagian program berjalan dengan efektif.. Redistribusi Keuntungan Ekonomi dalam pembagian bantuan sosial tunai mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam pendataan karena masih terdapat data yang lama, serta adanya kedekatan keluarga dalam program ini. Relokasi kesempatan ekonomi, terdapat masyarakat yang kurang mampu dan rentan miskin yang masih belum mendapatkan bantuan, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali dikarenakan masih terdapat pendataan calon penerima yang belum maksimal pada saat validasi dan verifikasi data penerima.

2. Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang Keseimbangan dan ketahanan pangan masyarakat yang terkena dampak pandemi menyebabkan masyarakat di Kota Palembang mengalami kesulitan dibidang perekonomian, sehingga dengan adanya bantuan sosial tunai tersebut ada sedikit bantuan untuk bertahan. Meskipun bantuan ini belum blisa menghilangkan kemiskinan, setidaknya bisa dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta meringankan kesulitan ekonomi.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan pengkajian ulang terkait jumlah uang Bantuan Sosial Tunai yang dinilai jumlahnya terlalu kecil dan pendataan yang masih belum efektif.
2. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang kebijakan bantuan sosial tunai agar tepat sasaran.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memfokuskan lagi tema yang akan diambil dalam suatu penelitian, sehingga hasil yang didapatkan tidak jauh dari perkiraan peneliti. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai analisis ekonomi politik kebijakan bantuan sosial tunai di kota Palembang agar terlebih dahulu melakukan observasi dan pendekatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Aksara Pratama Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media
- Arifin. Bustanul. (2005). *Ekonomi Politik Kelembagaan Pangan*.
- B.P. S (2020). *Kota Palembang dalam Angka*. Palembang: BPS Kota
- Citra Mandiri Press. Coparaso, J.A. & Levine. (2015). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT. Gelora
- Halim Abdul, M. (2018). *Politik Lokal Aktor, dan, Problem, dan*
- Husaini, M. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: LP3ES *Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara *Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Martono, N. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo *Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Miles. B. Mathew, d. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Palembang*. Persada. Pessindo.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wahab, S.A (2008). *Analisis Kebijaksanaan Formulasi ke Implementasi*



Wibawa, S. (2004). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media

**SKRIPSI :**

Nur Azizah Mayasari, (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Peneltiavn Masyarakat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*,Ponorogo: Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Ponorogo.

Yeni Puspita, (2011). *Redistribusi dan Bantuan Langsung Tunai (Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Brawijaya.

**INTERNET :**

<http://intens.news/penerima-bantuan-sosial-tunai-ddinilai-tidak-tepat-sasaran/> diakses pada 28 November 2020.

<http://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-50-laporan-bansos-diterima-ombudsman-ri-perwakilan-sumsel> diakses pada 28 November 2020.

<https://sumsel.idtimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-efrizal/penerima-bansos-di-sumsel-bertambah-132110-kkterdampak-covid>, diakses pada 12 Januari 2021.

<http://sumeks.co/warga-oi-ribut-soal-bantuan-dana-bstbly-dan-bpnt/>, diakses pada 12 Januari 2021.

<http://www.kompas.com/tren/red2021/05/19/093100165/bansos-tunai-diperpanjang> , diakses pada 19 Mei 2021.

<http://m.merdeka.com/uang/jokowi-minta-pemerintah-pusat-dan-daerah-update-data-penyaluran-bansos.html/>, diakses pada 19 Mei 2021.

**JURNAL :**

Baso Iping, (2020). *Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pnademi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*, volume 1, Issue 2, Juli 2020 E-ISSN : 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768.

E.S. Ingratubun & W. Sombolayuk, (2018). *Ekonomi Politik Dalam Pembangunan Industrialisasi Global*, Vol. 16 No. 2.

# **LAMPIRAN**

## **DATA INFORMAN**

1. Nama: Ranika

Usia : 43 Tahun

Jabatan : Analisis Data Dan Informasi Dinas Sosial Kota

Palembang

2. Nama : Agus

Usia :43 Tahun

Masyarakat Kecamatan Sako Kelurahan Sukamaju.

3. Nama: Yuli

Usia : 34 Tahun

Masyarakat Kecamatan Sako Kelurahan Sukamaju

4. Nama : Maya

Usia : 48 Tahun

Masyarakat Kecamatan Sematang Borang Kelurahan Srimulya

5. Nama : Yayang

Usia : 34 Tahun

Jabatan : Ketua RT 10 Kecamatan Kemuning Kelurahan 20 Ilir

6. Nama : Juliarti

Usia : 58 Tahun

Masyarakat Kecamatan Kemuning Kelurahan 20 Ilir

7. Nama : Dr. Muh. Syawaluddin, M. Ag

Usia : 50 Tahun

Jabatan : Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora

(Akademisi UIN RF) dalam webinar tentang BST

8. Nama : Risdayati

Usia : 51 Tahun

Jabatan : Kepala POS Kota Palembang (dalam webinar BST)

9. Nama : Dita

Usia : 27 Tahun

Jabatan : Anggota DTKS wilayah Kecamatan Kemuning

10. Nama : Rudi Pangaribuan

11. Usia : 37 Tahun

Jabatan : Pengamat Sosial/ Aktivis

**PEDOMAN WAWANCARA  
ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI KOTA  
PALEMBANG**

NO.	VARIABEL	ASPEK	INDIKATOR	PERTANYAAN	NARASUMBER
1.	Ekonomi Politik Kebijakan	Mekanisme Kelembagaan	Terkait hal-hal di mana perubahan institusi akan meningkatkan efisiensi produktif ekonomi	1) Siapa saja orang yang terlibat dalam program bantuan sosial tunai ini? 2) Bagaimana mekanisme penyediaan data penerima dan koordinasi dari pihak instansi yang terkait? 3) Bagaimana pihak terkait bekerjasama agar bantuan sosial tunai ini berjalan dengan efektif? 4) Bagaimana strategi pelaksanaan BST agar tepat sasaran? 5) Mengapa terjadi perubahan besaran	Dinas Sosial

				penerima dari awalnya Rp600,000 menjadi Rp 300,000 per bulan?	
		Keseimbangan dan ketahanan pangan	Terkait dengan hal-hal di mana distribusi pendapatan secara sengaja ditingkatkan	<p>6) Bagaimana pendapat bapak/ibu selaku penerima, apakah sangat terbantu dengan bantuan ini?</p> <p>7) Apakah bantuan ini sangat membantu untuk kelangsungan hidup sehari-hari?</p> <p>8) Apa Program BST bisa mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu?</p>	Masyarakat

2.	Bantuan Sosial Tunai	Pemanfaatan	Terkait dengan redistribusi keuntungan ekonomi	9) Apakah ada kendala atau salah sasaran dalam pembagian bantuan sosial tunai ini? 10) Bagaimana mekanisme pembagian BST dikantor pos ini? 11) Apakah ada kendala data yang ditemukan yang tidak sesuai pada penerima BST tersebut?	Kantor Pos, DTKS, RT Setempat
----	----------------------	-------------	--	---	-------------------------------



		Pemindahan	Terkait dengan relokasi kesempatan ekonomi	<p>12) Mengapa terjadi calon penerima yang belum atau tidak mendapatkan sama sekali bantuan sosial tunai ini?</p> <p>13) Apa syarat penerima BST agar bisa mendapatkan bantuan ini?</p> <p>14) Bagaimana cara agar bantuan ini bisa berjalan secara efektif?</p>	Pengamat Sosial, DTKS, dan Masyarakat
--	--	------------	--	--	---------------------------------------

## DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA



**Wawancara bersama Ranika Selaku Divisi Analisis Data dan Informasi di  
Dinas Sosial Kota Palembang**



**Wawancara bersama Dita selaku anggota Data Terpadu Kesejahteraan  
Sosial Wilayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang**



## Wawancara Bersama Juliarti Selaku Masyarakat Penerima BST

### Kecamatan Kemuning

**FDSS**  
FORUM DISKUSI SUMATERA SELATRAN (FDSS)  
**WEBINAR**  
Efektivitas BST Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19

**Pemateri :**

- Mirwansyah  
Kepala Dinas Sosial Sumsel
- Risdayani  
Kepala Pos Palembang
- Rudi Pangaribuan S,IP  
Pengamat Sosial
- Dr. Muh Syawaludin M.Ag  
Akademisi
- Arip Farwita  
Founder FDSS

**Moderator :**  
Rinihanta Widindy

**Facilitas :**  
- Berkeadilan  
- Bersih, Sehat dan Bermartabat  
- Aman, Peka dan Canggih  
- Berkualitas

Contak Person : 0813-8813-2200 (Pusat dan Wibawa)  
0813-7914-1251 (Grafis dan Admin)

Kamis, 11 Februari 2021 | Pukul 19.00 WIB via ZOOM

## Webinar Efektivitas BST Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19

Bersama Ibu Risdayani Kepala Pos Palembang, Rudi Pangaribuan S,IP

Pengamat Sosial, Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah dan Dr.Muh

Syawaludin M.Ag Akademisi Uin Raden Fatah



**Wawancara Bersama Ibu Maya**



**Ibu Yuli Saat Mendapatkan BST**

**Saat Pembagian BST Di Warga Kecamatan Kemuning**



## Saat Pembagian BST Di Kantor Pos Kota Palembang





KAPUTUAN DEWAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: F.F/2021/00/00/00/01/001/2021

Tentang

PENULIHAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- MEMORANDUM**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh orang ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
  3. Lembar persetujuan surat dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik A.N. Karimawati, tanggal 15 November 2020

**REKAMINGAT :**

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor -407 tahun 2006
3. Instruksi Direktur Lembaga Ilmu Depatemen RI Nomor KEP/DIR/06/SI/HT/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
4. Instruksi Menteri Agama RI No.D/12/1984 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
5. Kap.Menag RI No. 82 tahun 2016 tentang Sekolah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2012

**MEMUTUSKAN**

**MEMETAPKAN  
Perdana**

Menunjuk Saudara

NAMA	NIP/NIK	Sebagai
Alfariz Ropik, M.Si	19700819 200710 1 305	Pembimbing I
Rivald Apriandi, M.Si	2021060401	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saecoko

Nama : Kartawan

NIM : 1857028057

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi

"Analisis Politik Kebijakan Sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jeda Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT, 03 Februari 2021 s.d. 03 Februari 2022

**Ketua :** Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sewenang-wenang untuk meneliti Judul/Paragraf Skripsi tersebut tanpa mengolah substansi penelitian

**Ketega :** Keputusan ini tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dipublikasikan sebagaimana mestinya apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan

Tersusun

1 Lembar

1 Ditemp Pembacaan/Instruksi/penyempurnaan

1 Pembimbing Skripsi/1 dan 2/1

1. Ketua/1 dan 2/1, 1 dan 2/1

1. A.N.





# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B. 88 /Un.09/VIII/TL.01/01/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth  
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang  
DI  
Palembang

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Kurniawan  
Alamat : Jalan Air Sugihan No.828 Rt.12 Rw.09 Palembang  
NIM : 1657020057  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang  
Judul Skripsi : **Analisis Politik Kebijakan Sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang)**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Januari 2021



Tembusan  
1. Ka Prodi Ilmu Politik  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG  
JL. LINDUK JAYA NOVIOR - 30111 BEMANG LILBAR DAUN PALEMBANG  
TEL. POK. (071) 408725  
Email: balak@korpasipal.go.id

Palembang, 18 Januari 2021

Nomor : 076/0068/BAN.KBP/2021  
Sifat : Dinas  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian Pengambilan Data

Kepada Yth  
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang  
di  
Palembang

Menghormati Surat Deklarasi Pakar/Inisi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B. 83 / Un.04 / VII / TL.30/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini dibentangkan kepada saudara sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Jenis Skripsi
1.	Khuswani	067020027	Analisis Perilaku Ke-Bhaktian Sosial Masyarakat Lampung (Tesis/MT) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Kuto Palembang)

Untuk Melakukan Penelitian Pengambilan Data  
Masa berlaku selama: 18 Januari 2021 s.d 18 April 2021

**Dengan Catatan:**

1. Sebelum melakukan penelitian pengambilan data/survei/riset terlebih dahulu mengisi lembar persetujuan orang tua
2. Penelitian tidak diizinkan menyanggah soal politik dan melakukan penelitian/pengambilan data/survei/riset yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan jural yang telah diprogramkan
3. Dilarang melakukan penelitian/pengambilan data/survei/riset agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di daerah setempat
4. Apabila izin penelitian/pengambilan data/survei/riset telah habis masa berlakunya, sedang lagi penelitian/pengambilan data/survei/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin
5. Setelah selesai menyelesaikan penelitian/pengambilan data/survei/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Dinas Kesenian Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Dendaikan untuk ditandatangani dan untuk dibantu sepenuhnya

ALA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PALEMBANG  
SEKRETARIS BADAN

H. BAMBANG WICAKSONO, SE, MT  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP 19740413200031004

Tertutup

1. Deklarasi Pakar/Inisi Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa Yth.





**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KURNIAWAN  
NIM : 1657020057  
Judul : analisis politik kebijakan sosial bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi di Kota Palembang  
Dosen Pembimbing : AINUR ROPIK M.Si

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2021-04-19 22:34:45	Bab1,2,3	ACC. BAB. II Silahkan lanjut ke bab berikutnya
2	2021-04-28 18:36:17	Bimbingan 1,2,3 dan 4	Acc. Untuk dapat di ajukan pada ujian komperehensip. Untuk bab Selanjutnya konsultasikan dan selesaikan dengan pembimbing 2 dahulu
3	2021-06-17 08:55:46	Bab 1,2,3,4 Analisis Ekonomi Politik BST (Bantuan Sosial Tunai) Di Kota Palembang	ACC. Untuk lanjut ke Bab Berikutnya sekaligus jadikan Full Skripsi, dari Kata Pengantar, abstrak dll.
4	2021-06-30 10:41:50	Full Bab Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang	Pastikan dan sinkronkan antara Rumusan masalah dengan kesimpulan.. Perbaiki abstraknya ganti kata menyebutkan diganti dengan menunjukkan
5	2021-07-15 11:54:48	Skripsi Fullbab Kurniawan	Acc. Untuk di ajukan pada ujian munaqosah

2021/07/15



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KURNIAWAN  
NIM : 1657020057  
Judul : analisis politik kebijakan sosial bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi di Kota Palembang  
Dosen Pembimbing : RENI APRIANI S.Ip.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2021-04-13 12:56:56	Bab1,2,3	Perbaiki BAB 1: data yg di sajikan di latarblakang hanya mmbhas BST jd perlu adanya perubahan judul skripsi. Paragraf akhir latarblakang knp msh mncantumkan judul yg lama? Rumusan mslah blm di lakukan prbaikan krn msh mmkai prtnyaan yg di ajukan pd saat proposal skripsi. Tabel yg ada di latarblakang ditambahkan dta penduduk di perkecamatan Kota PLG spy bs dilihat brpa bnyk masy yg mndpt BST ini. SARAN: perubahan judul skripsi (Analisis politik ekonomi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang) Bab 2: kerangka teori, teori yg di pakai saat ini mrjuk ke kebijakan krn keilmuannya ilmu politik, SARAN: ganti teori. Di tmbh teori penunjang lainnya (bisa di cari teori politik ekonomi) krn brhubungan dg kebijakan ksjhtraan masy
2	2021-05-06 09:51:36	Revisi Bimbingan bab 1,2 dan 3 serta bimbingan bab 4	Belum dilakukan perbaikan dr catatan bimbingan yg terdahulu. Terlihat jelas di bab 1 bagian latar blkang, rumusan masalah dlnya. Teori yg di gunakan jg msh teori kebijakan. Pahami kmbali BST dan BLT krn bantuan ini brbeda. Bab 4 data analisis yg di peroleh blm mrujuk ke teori politik krn msh mnggunakan teori kebijakan. Sblum melakukan penelitian ke lapangan buatlah pedoman wawancara
3	2021-06-17 13:54:39	Bab,1-4 Analisis Ekonomi Politik Kebijakan BST (Bantuan Sosial Tunai) Di Kota Palembang	Berikan penjelasan 1paragraf dari tabel yg di latarbelakang. Bab hasil: perdalam kembali analisisnya, misal utk indikator No.1 ttg mekanisme pengelolaan BST bs mrujuk dr peraturan kebijakan pemerintah pusat lalu bahas mekanisme pengelolaan di pemkot Palembang
4	2021-06-22 10:22:47	Revisi Bab1-4 Analisis Ekonomi Politik Kebijakan BST di Kota Palembang	Belum di lakukan perbaikan dr catatan bimbingan 3 bag.latrblakang. Tmbhkan informan (org yg sdh di wawancarai) diteknik pengumpulan data di subbab. wawancara. Bab hasil: ubah kalimat yg seperti: (penulis menyimpulkan, penulis menyakini, peneliti ....). Kesimpulan perbaiki: hrs mnjawab rumusan mslh brdsarkan teori dan dr hsil analisisnya.

5	2021-06-28 06:53:26	Full Bab Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang	Lakukan perbaikan abstrak dan kesimpulan. Acc secara keseluruhan dan lanjutkan untuk mendaftar ke ujian komprehensif
6	2021-07-15 13:57:04	Skripsi Fullbab Kurniawan 1657020057	Perbaiki sesuai arahan pd saat bimbingan offline kmren & dilanjutkan ke ujian munaqsyah.. semangat smg sukses!

2021/07/15



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**REKAPITULASI NILAI**

Berita acara munaqasyah skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : Kurniawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020057  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Hari / Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021  
Judul Skripsi : *Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang*

Komponen Penilaian :

No.	Tim Penguji	Jabatan	Nilai
1	Ainur Ropik, M.Si.	Pembimbing I	85
2	Reni Apriani, M.Si.	Pembimbing II	80
3	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Penguji I	86
4	Afif Musthofa Kawammi, M.Sos.	Penguji II	85
5	Nilai Rata-rata Ujian Komprehensif		78,4
Nilai Keseluruhan			414,4
Nilai Rata-rata			82,88
Nilai Akhir Dalam Huruf			A

IPK :  
Total SKS :

Palembang, 3 Agustus 2021  
Wakil Dekan I

Dekan

**Prof. Dr. Izomiddin, MA**  
NIP. 19620620 198803 1 001

**Dr. Yenzizal, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197401232005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**



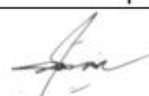
Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Kurniawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 165702005  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : *Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang*

**MEMUTUSKAN**

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ainur Ropik, M.Si.	Pembimbing I	
2	Reni Apriani, M.Si.	Pembimbing II	
3	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Penguji I	
4	Afif Musthofa Kawammi, M.Sos.	Penguji II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

---

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 3 Agustus 2021

**Ketua**

**Dr. Eti Yusnifa, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 197409242007012016

**Sekretaris**

**Rvlllan Chandra Eka Viana, MA.**  
NIP. 198604052019031011



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Kurniawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 165702005  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : *Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) \_\_\_\_

Palembang, 3 Agustus 2021  
Ketua Sidang

Dr. Eri Yusnita, S.Ag.,M.HI.  
NIP. 197409242007012016